

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Geliat SRG Rumput Laut

Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi, serta
Penciptaan Kemakmuran
Rakyat

**remarkable
Indonesia**

SRG Simalungun
Siap Mengalun
....11

Denyut PLKA Riau
dari 'Mati Suri'
....12

Hedging Dalam
Perdagangan
Berjangka Komoditi
....24



Foto : Kepala Biro Pasar Fisik & Jasa, Ismadjaja Toengkagie, berdialog dengan Ketua Umum Kospemindo, Arman Arfah.

Deddy Saleh, mantan Kepala Bappebti periode 2008-2010, pada rapat umum pemegang saham (RUPS) Jakarta Futures Exchange (JFX) yang diselenggarakan 17 April 2013, lalu, ditetapkan sebagai Komisaris Utama JFX. Ditetapkannya nama Deddy Saleh sebagai Komisaris Utama JFX menggantikan Hasan Wijaya, diharapkan mampu menggiring dan meningkatkan likuiditas JFX khususnya pada kontrak berjangka multilateral. Di sisi lain, seperti diutarakan Deddy Saleh, melanjutkan misi yang belum tuntas semasa menjabat sebagai Kepala Bappebti.

“Kementerian Perdagangan sangat berkepentingan bahwa industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air menjadi instrumen pembentukan harga yang transparan, fair dan likuid. Sebab itu saya didukung memasuki industri ini. Dan menjadi sebuah tantangan baru untuk saya,” kata Deddy Saleh.

Jika sebelumnya Deddy Saleh sebagai otoritas yang mengawasi industri perdagangan berjangka komoditi, namun kini menjadi pelaku yang harus membuktikan kepiawaiannya di bidang perdagangan berjangka.

Bersamaan dengan diangkatnya Deddy Saleh sebagai Komisaris Utama JFX, RUPS itu juga menetapkan Sherman Rana Krishna sebagai Dirut JFX. Sebelumnya Sherman mendapat mandat dari pemegang saham sebagai direktur mengisi jabatan yang kosong.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, pada 30 April 2013, lalu, juga menambah kekuatan baru ditubuh Bappebti dengan melantik pejabat Eselon II yang masih memiliki masa karier lebih panjang. Diantaranya pejabat Bappebti yang dilantik itu yakni, Sri Haryati dilantik Mendag Gita Wirjawan menjadi Kepala Biro Hukum Bappebti, menggantikan Alfons Samosir yang memasuki masa pensiun.

Selanjutnya, Sri Nastiti Budianti, dilan-

tik menjadi Kepala Biro Perniagaan Bappebti. Sri Nastiti Budianti menggantikan Robert James Bintaryo yang menggantikan posisi Nizarli sebagai Sekretaris Bappebti. Sedangkan Nizarli memasuki masa pensiun.

Dari pejabat Bappebti yang dilantik Mendag tersebut, terdapat tiga jabatan yang dipromosikan menjadi Eselon II yakni Sri Haryati, sebelum menjabat Kabag Pelayanan Hukum, Biro Hukum Bappebti. Di posisi kedua yakni Sri Nastiti Budianti, sebelumnya tercatat sebagai staf khusus Bappebti.

Dan yang ketiga yakni, Mardjoko yang dilantik menjadi Kepala Biro Analisis Pasar, menggantikan Chrisnawan Triwahyuardhianto yang juga memasuki masa pensiun. Sebelumnya Mardjoko tercatat sebagai Direktur Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Pembaca yang budiman, instrumen pembiayaan sistem resi gudang (SRG) yang dikembangkan pemerintah kian hari kian dirasakan manfaat ekonomisnya. Hal itu terbukti dengan terbitnya SRG rumput laut di gudang Kospemindo Makassar, Sulsel, pada 8 April 2013 lalu. Terbitnya SRG rumput laut sebanyak 200 ton itu disaksikan langsung Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Dan pada kesempatan itu, Mendag, berpesan agar SRG rumput laut menjadi salah satu solusi berkembangnya industri hilir rumput laut di dalam negeri. Hal itu dikatakan Mendag, karena industri rumput laut memiliki potensi besar dikembangkan di tanah air dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Di sisi lain, kata Mendag, komoditi rumput laut menjadi alternatif pangan bergizi tinggi.

Salam!

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

KONTRAK
BERJANGKA
MENGAJARI DENGAN INTEGRITAS



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab

Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi

Nizarli

Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

Dewan Redaksi

Pantas Lumban Batu, Agus
Muharni S., Harry Prihatmoko,
Diah Sandita Arisanti, Poppy
Juliyanti, Erni Artati, Sri
Haryati, Rizali Wahyuni

Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin, Umar
Hasan.

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat
Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel
ataupun opini dikirim lengkap
dengan identitas serta foto ke
E-mail:

buletin@bappebti.go.id



Berita Utama.....4-7

- Geliat SRG Rumput Laut
- Menggali Potensi Industri Hilir Rumput Laut

Resi Gudang.....10-11

- SRG Simalungun Siap Mengalun
- SRG Tasikmalaya Berkemas

Pasar Lelang.....12-13

- Denyut PLKA Riau dari 'Mati Suri'

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- 2013 Ditaregtkan Berdiri 6 JFX Corner
- Duet Deddy-Sherman Janjikan Perubahan JFX
- 'Duo Sri' Bappebti Dilantik Mendag
- JFX Tambah Produk Tingkatkan Likuiditas

Analisa.....19

Breaknews.....20

Info SRG.....20-21

Kolom.....24-25

- Hedging Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-resiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

Berjangka...8-9

Jerat Negara Konsumen
Tentukan Harga Komoditi



Wawasan...22-23

Persiapan Pelaksanaan
Sistem Resi Gudang



Kiprah...26-27

'Mesin Gress' MGF





Mendag, Gita Wirjawan, kunjungi gudang SRG rumput laut Kospermindo, Makassar.

Geliat SRG Rumput Laut

Kospermindo merintis SRG rumput laut yang pertama di Indonesia, guna memberi kepastian harga dan jaminan pemasaran hasil produksi. Rumput laut selain sumber pangan bergizi tinggi, juga memiliki potensi bisnis dan komoditi andalan ekspor Indonesia.

Komoditi rumput laut merupakan salah satu komoditi andalan Sulawesi Selatan yang harus dikembangkan dengan meningkatkan nilai tambah. Dengan demikian harga rumput laut tetap tinggi di tingkat petani. Selain memiliki potensi bisnis yang cukup luas, komoditi rumput laut juga menjadi alternatif pangan bergizi tinggi.

Sebab itu, industri rumput laut harus ditata sehingga menjadi global player. Menata industri rumput laut dimulai dari petani yang mendapat kepastian harga terbaik dan kepastian pemasaran hasil produksi.

Demikian antara lain dikatakan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, saat mengunjungi gudang rumput laut milik Koperasi Perikanan Masyarakat Pesisir Indonesia (Kospermindo), di Kawasan Industri Makassar (KIMA),

Makassar, Sulsel, Senin, 08 April 2013. Hadir dalam kunjungan Mendag itu diantaranya, Sekjen Kementerian Perdagangan, Gunaryo, Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya dan jajaran pejabat Bappebti, Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia, Direksi Jakarta Futures Exchange, Direksi Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Pejabat Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, pengurus perbankan dan sejumlah petani rumput laut binaan Kospermindo.

“Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi pasar yang cukup luas untuk mengembangkan industri rumput laut. Produk rumput laut tidak saja untuk tujuan ekspor, tetapi juga dikonsumsi di dalam negeri sebagai sumber pangan bergizi tinggi,” jelas Gita.

Potensi pasar rumput laut di dalam negeri belum optimal digarap, tambah

Gita. Sebab pelaku industri hilir masih terbatas. “Karena itu saya pikir, kita harus dorong dunia usaha mengembangkan industri rumput laut terutama di wilayah timur Indonesia.”

Lebih jauh dikatakan Mendag, rumput laut mengandung banyak vitamin yang diperlukan tubuh kita, dan untuk memproduksi rumput laut sangat mudah dan murah dengan luas laut yang kita miliki. “Budidaya rumput laut merupakan alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai khususnya di Sulawesi Selatan.”

“Saya baru pertama kalinya mencicipi urap yang dibuat dari rumput laut, dan rasanya sangat enak. Tadi juga saya disuguhi kopi dengan citra rasa rumput laut, juga sama enakannya. Jadi menurut saya, komoditi rumput laut ini harus kita kembangkan dari hulu hingga ke hilir, sehingga nilai tambahnya semakin besar



“

komoditi rumput laut ini harus kita kembangkan dari hulu hingga ke hilir, sehingga nilai tambahnya semakin besar

”



Mendagri, Gita Wirjawan, mencoba kudapan urap rumput laut.

diperoleh masyarakat,” jelas Gita.

Dijabarkan Gita, untuk memberi jaminan kepastian harga bagi para petani, komoditi rumput laut bisa disimpan di gudang dengan skema sistem resi gudang (SRG). “Dengan SRG, petani bisa memperoleh pembiayaan murah. Lantas saat harga tinggi komoditi rumput laut bisa dijual ke pasar,” kata Gita Wirjawan.

SRG 200 ton

Ketua Kospemindo, Arman Arfah, dalam kunjungan Mendagri, mengatakan, Kospemindo saat ini membina petani rumput laut sebanyak 1.783 orang yang tersebar di kabupaten-kota Sulsel dan Sulteng.

“Produksi petani rumput laut binaan Kospemindo semuanya kami masukan ke dalam skema pembiayaan SRG. De-

ngan harapan petani dapat memperoleh harga terbaik. Di saat musim hujan, harga rumput laut cenderung tinggi karena produksi yang berkurang. Tetapi di saat musim kering harga cenderung murah karena kelebihan produksi. Jadi satu atau dua bulan ke depan, harga rumput laut kami prediksi masih akan naik. Karena, masih ada potensi musim penghujan,” kata Arman.

Menurut Arman, saat ini Kospemindo menyimpan rumput laut jenis *gracilaria* sebanyak 200 ton, komoditi itu di panen dari tambak para petani yang tersebar di wilayah Sulsel.

“Saat komoditi itu masuk gudang, harganya sebesar Rp 5.500 per kg, kita harapkan nanti bisa mencapai Rp 7.500 per kg,” terang Arman.

Kospemindo sejak tahun 2002 telah membina petani rumput laut di pesisir

Sulsel berkat dukungan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tahun 2012 lalu Kospemindo memasarkan lebih dari 170.000 ton rumput laut, sekitar 50 % diantaranya untuk tujuan ekspor sedangkan sisanya dipasarkan pada industri makanan di dalam negeri.

Dikatakan Arman, meningkatnya hasil produksi rumput laut dari para petani sehingga diperlukan sumber pembiayaan yang cepat dan murah. “Sebab itu, kami memutuskan memilih SRG sebagai sumber pembiayaan. Selain lebih mudah, kami pun bisa memberi kepastian harga kepada para petani.”

Lebih jauh diutarakan Arman, Kospemindo sejak awal tahun 2013 sudah menerbitkan sebanyak dua resi gudang dengan jumlah rumput laut yg dijamin sebanyak 96 ton. Dalam kunjungan Mendagri ini pun, Kospemindo akan mendapatkan resi gudang dari pengelola gudang- PT Pertani sebesar 200 ton rumput laut.

Menurut Arman, dengan terbitnya resi gudang di gudang milik Kospemindo, direncanakan di masa mendatang Kospemindo ditunjuk dan mendapatkan izin sebagai pengelola gudang SRG rumput laut dari Bappebti.

“Sebab, saat ini pun kami sudah mengelola gudang rumput laut di Kab. Gowa dan Kab. Bone. Dengan menjadi pengelola gudang, kami targetkan komoditi rumput laut sebesar 1.500 ton per bulan,” tandas Arman Arfah. ▲



Menggali Potensi Industri Hilir Rumput Laut

Sebagai negara kepulauan, industri rumput laut seharusnya sudah lebih maju dibandingkan dengan negara lain. Namun, para pelaku masih terganjal wawasan, teknologi dan pembiayaan. Kiprah SRG rumput laut diyakini pendorong efisiensi industri hilir.



Produk industri hilir rumput laut Indonesia.

Industri rumput laut di Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1960-an, hal itu ditandai dengan ekspor rumput laut. Namun, animo masyarakat berbudidaya rumput laut mulai meningkat sejak tahun 1980-an. Sejauh ini, petani rumput laut baru membudidayakan tiga avarietas rumput laut yakni *gracilaria*, *euchieuma cuttonii*, dan *euchieuma spinosum*. Pada hal, di dunia ada sebanyak 550 jenis rumput laut yang dapat dibudidayakan dan memiliki potensi bisnis.

Ekspor produk rumput laut Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat ke berbagai negara seperti Eropa, Argentina, dan Cina. Negara tujuan ekspor terbesar adalah Cina, yang mencapai 30 % dari total ekspor. Tahun 2012 nilai ekspor rumput laut Indonesia mencapai sebesar US\$ 200 juta dengan volume 169 ribu ton, naik dari tahun 2011 yang hanya 159 ribu ton.

Sementara itu, negara pesaing yang menempel ketat ekspor rumput laut

Indonesia berasal dari negara Filipina, Thailand dan Vietnam. Namun untuk varietas *eucheuma cottonii*, produksi Indonesia tetap menjadi nomor satu di dunia.

Dengan maraknya kegiatan di sektor hilir rumput laut belakangan ini, kinerja ekspor diharapkan makin meningkat di masa mendatang. Sebab, dari nilai ekspor tahun 2012 yang mencapai US\$ 200 juta, hanya sekitar 10 % produk olahan. Sisanya masih diekspor dalam bentuk rumput laut mentah.

Secara keseluruhan industri pengolahan rumput laut di Indonesia saat ini ada sebanyak 24 perusahaan yang tersebar di nusantara, tetapi industri itu lebih banyak bercokol di kawasan Indonesia timur. Dan di tahun 2013 ini, ada sebanyak enam perusahaan yang menanamkan investasi di sektor hilir rumput laut. Total nilai investasi dari enam perusahaan itu mencapai Rp 165 miliar.

Setiap perusahaan itu diperkirakan memiliki kapasitas produksi sekitar

100 ton per bulan. Dan menghasilkan produk-produk olahan seperti semi refined carrageenan (SRC) dan refined carrageenan (RC).

Mendukung program hilirisasi rumput laut, pemerintah juga menggenjot produksi hulu. Tahun 2013 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi rumput laut basah mencapai 7,5 juta ton, naik 30 % dibandingkan tahun lalu 5,2 juta ton. Areal potensial budidaya rumput laut di Indonesia mencapai 1.110.900 ha.

Kendali China

Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Aziz, menuturkan, untuk bisa menggenjot bisnis di sektor hilir rumput laut, Indonesia harus bisa meningkatkan daya saing karena produk rumput laut Indonesia masih kalah dari produk China. “Eksporti rumput laut China mendapat keringanan fiskal, sehingga harganya lebih murah.”

“Sebab itu, importir rumput laut asal China selalu berupaya mengendalikannya harga rumput laut dari Indonesia. Hal itu juga disebabkan hampir 30 % volume ekspor Indonesia diserap importir China,” terang Aziz.

Menurut Aziz, pengaruh importir China juga menimbulkan kecemburuan antar pengusaha dengan petani rumput laut. Wilayah yang tidak memproduksi rumput laut dan hanya mengekspor seperti Makassar bisa menikmati harga Rp 12.000 per kg. Sementara daerah produsen hanya menikmati harga jual Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per kg.

“Besarnya pengaruh importir China dalam bisnis rumput laut juga dikarenakan timpangnya biaya logistik



Menjemur rumput laut.

yang mahal di dalam negeri. Biaya angkut rumput laut dari Tuol atau Ambon ke Makassar dan Surabaya sekitar Rp 1.000 per kg. Sementara dari Surabaya ke China cuma Rp 250 per kg. Sebab itu masalah logistik ini juga yang perlu kita atasi,” jelas Safari Aziz.

Lebih jauh dikatakan Aziz, besarnya ekspor rumput laut Indonesia yang mencapai 80 % dalam bentuk mentah disebabkan kurangnya wawasan masyarakat terhadap potensi rumput laut. Di samping itu, minimnya teknologi yang dimiliki. Sehingga nilai tambah yang diperoleh petani menjadi lebih kecil. “Umumnya masyarakat Indonesia hanya mengenal konsumsi rumput laut sebagai bahan agar-agar.”

“Memang masyarakat belum banyak mendapat informasi tentang potensi rumput laut. Pada hal, produk rumput laut bisa menjadi bahan penolong serbaguna. Seperti, membikin roti lebih kenyal dan mengentalkan susu. Atau membuat bakso menjadi lebih kenyal, sehingga tidak menggunakan boraks,” kata Aziz.

Belum maksimalnya pengelolaan rumput laut di tanah air membuat kontribusinya terhadap penerimaan negara menjadi lebih kecil. Saat ini di seluruh dunia, nilai perdagangan rumput laut dalam setahun sudah mencapai US\$ 70 miliar. Sedangkan Indonesia pada tahun 2012 lalu baru mencapai US\$ 200 juta.

Dukung Ekspor

Implementasi SRG untuk komoditi rumput laut sangat bermanfaat bagi petani rumput laut sebagai salah satu alternatif pembiayaan dan sarana tunda jual yang efektif dalam menghadapi panen raya, di mana pada saat tersebut harga cenderung turun. Selain itu, masuknya komoditi rumput laut skema SRG juga dapat mendukung peningkatan ekspor.

“Masuknya rumput laut dalam skema SRG membuat industri pengolahan atau pun eksportir menjadi lebih efisien. Sebab, rumput laut yang masuk gudang SRG sudah kualitas terbaik sesuai dengan SNI. Di samping itu, ada jaminan dan kepastian suplai,” jelas Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie.

Karenanya, Bappebti mengundang pihak swasta yang memiliki gudang sebagai penyimpanan rumput laut, tambah Ismadjaja. “Sepanjang gudang tersebut memenuhi persyaratan SNI, sangat mungkin digunakan gudang SRG rumput laut.”

“Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk membangun gudang SRG yang lebih banyak. Maka, Bappebti membuka peluang bagi pihak swasta yang memiliki gudang untuk dijadikan penyimpanan rumput laut atau komoditi ekspor lainnya. Sehingga skema SRG bisa dinikmati masyarakat,” ujar Ismadjaja.

Hingga 1 April 2013, jumlah resi gudang yang telah diterbitkan terdapat sebanyak 782 resi dengan total volume komoditi sebesar 31.427,9 ton dan dengan total nilai Rp 150,8 miliar. Sedangkan komoditi yang telah masuk gudang SRG terdiri dari 26.657,58 ton gabah, 3.677 ton beras, 976,93 ton jagung, 20,39 ton kopi dan 96 ton rumput laut.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan SRG sejak tahun 2009 telah bekerja sama dengan pemerintah daerah guna pembangunan sebanyak 80 gudang SRG yang tersebar di sejumlah daerah. Serta, gudang-gudang tersebut dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti mesin pengering dan lainnya.

Lebih jauh diutarakan Ismadjaja, pemerintah daerah sangat berperan penting dalam implementasi SRG, baik dalam hal kemudahan perizinan maupun sosialisasi serta memberi pemahaman teknis SRG.

“Pemerintah daerah yang memiliki visi peningkatan ekonomi masyarakat tentunya akan mengimplementasikan SRG dengan benar dan tepat. Namun, harus direncanakan dengan matang bersama instansi terkait lainnya. Dengan demikian SRG menjadi instrumen pembiayaan yang murah dan mudah bagi pelaku komoditi di daerah,” ujar Ismadjaja Toengkagie. ▲



Jerat Negara Konsumen Tentukan Harga Komoditi

Sepanjang negara produsen tidak memiliki bursa berjangka komoditi sebagai acuan harga, maka negara konsumen akan terus menjajah dengan menentukan harga komoditi dari negara produsen.

Umur kemerdekaan Indonesia pada tahun ini akan mencapai 68 tahun. Namun, jika mendengar pemaparan Officer Research & Development Division, Jakarta Futures Exchange (JFX), Renji Betari, seperti teks proklamasi yang dibacakan pada saat 17 Agustus 1945, belum menyatakan Indonesia merdeka seutuhnya. Mengapa?

Dalam Press Gathering dengan tema 'Dari Price Taker Menjadi Price Maker' yang diselenggarakan JFX, Jumat (12 April 2013), di Jakarta, Renji Betari menyoro topik yang cukup menarik, yakni 'Bursa Produsen VS Bursa Konsumen'. Maksudnya? Renji menjelaskan, Bursa Produsen yaitu negara penghasil komoditas tertentu dan juga memiliki bursa

untuk komoditas tersebut. Sedangkan, Bursa Konsumen yakni negara yang hanya mengonsumsi komoditi dan tidak sebagai penghasil komoditi tersebut. Tapi, negara ini memiliki bursa untuk komoditi itu.

Menurut Renji, keberadaan bursa produsen dan bursa konsumen membuat perbedaan yang luar biasa dalam perkembangan harga komoditas. Harga komoditas gula telah meroket naik 400 % dalam 8 tahun terakhir, dari US\$ 6 menjadi US\$ 24 per metrik ton. Begitu pula dengan harga jagung yang melambung sejak US\$ 200 menjadi US\$ 630 atau naik 315 % sejak 2004-2012. Hal yang sama pada harga kedelai naik dari US\$ 500 ke US\$ 1440 naik 280 % dalam kurun waktu yang tersebut.

"Persamaan antara komoditas gula, jagung, kedelai karena para negara produsen utama, yakni Amerika Serikat memiliki bursa komoditas sendiri di New York dan Chicago, sehingga para penjual memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga jual dari hasil alamnya," jelasnya.

Dengan demikian, jadilah Amerika sebagai negara yang menjadi acuan harga untuk komoditas itu, tambah.

"Tentunya, sebagai negara produsen, mereka ingin menjual harga komoditas yang semahal-mahalnya. Dan, harga komoditas tersebut dari masa ke masa terus mengalami kenaikan harga," tekan Renji.

Lain itu, India juga dikenal sebagai negara terbesar penghasil komoditi



“

Tanpa adanya bursa komoditas, negara produsen hanya menjadi donor darah bagi negara konsumen

”



Officer Research & Development Division, JFX, Renji Betari

emas dan juga memiliki bursa yang memperdagangkan komoditi emas. Menurut Renji, Mumbai Derivatif Exchange (MDX) yang beroperasi di awal tahun 2000-an sudah mampu menentukan harga emas di dalam negerinya. Sehingga harga emas di India lebih banyak dipengaruhi faktor-faktor internal. “Salah satu kunci keberhasilan MDX, mereka memanfaatkan pasar dalam negeri dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia.”

Minim Bursa

Bagaimana dengan Indonesia? Renji mengatakan, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen terbesar dunia untuk komoditas crude palm oil (CPO), kopi, kakao, karet,

timah batubara dan lainnya. Ironisnya, bukan Indonesia yang menentukan harga untuk komoditas tersebut. Justru harga ditentukan oleh bursa-bursa di negara konsumen, seperti di Tokyo Commodity Exchange untuk komoditi karet, ICE Futures untuk komoditi kakao dan kopi, Liffe-NYSE untuk kakao dan kopi.

“Kita sebagai negara produsen penghasil komoditi tersebut tidak mampu menentukan harga, tapi harga ditentukan oleh negara konsumen atau pembeli,” papar Renji. Pasalnya, bursa komoditas yang ada di Indonesia masih sangat minim transaksi. Akibatnya, tambah Renji, harga-harga komoditas tersebut tidak mengalami kenaikan harga bahkan cenderung turun.

“Lihat saja, kalau kita ketemu petani

kakao, mereka galau semua. Pasalnya, harga kakao terus mengalami penurunan hingga 40 %. Adapun harga komoditas lainnya juga jatuh, nyungsep, terguling-guling dan lalu tewas.”

Hal tersebut, kata Renji, merupakan sebuah penjahatan di era modern. “Di mana produsen menggunakan acuan harga dari negara-negara konsumen.”

Pada hal, jika negara produsen memiliki bursa komoditas yang memiliki acuan harga, maka negara itu akan kaya raya. “Indonesia pasti makmur jika bursa komoditasnya dimanfaatkan. Namun, selama masyarakat belum menggunakan harga bursa sebagai harga acuan perdagangan komoditi, maka bursa pun tidak akan maju. Dengan kata lain, Indonesia tetap dijajah oleh negara-negara konsumen yang seenaknya mengatur harga komoditi,” katanya.

Lebih lanjut Renji menyimpulkan, komoditas akan mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir, bilamana negara produsen memiliki bursa komoditas. “Tapi, jika negara produsen tidak memiliki bursa sendiri, maka harga komoditas tidak mengalami perubahan harga yang berarti dalam periode yang sama. Hal ini disebabkan produsen berkepentingan mendapat harga jual yang tinggi sementara konsumen mengharapkan membeli dengan harga yang rendah.”

“Tanpa adanya bursa komoditas, negara produsen hanya menjadi donor darah bagi negara konsumen,” tandas Renji Betari. ▲

Bursa Produsen Vs Bursa Konsumen

Bursa di Negara Produsen

(Desember 2011 – Februari 2013)

No	Komoditi	2011 (US\$)	2013 (US\$)	Perubahan
1	Kedelai	1.150	1.470	+ 28 %
2	Jagung	550	700	+ 27 %
3	Gandum	650	780	+ 20 %

Negara Produsen Non-Bursa (Konsumen)

(Desember 2011 – Februari 2013)

No	Komoditi	2011 (US\$)	2013 (US\$)	Perubahan
1	Kakao	2.150	2.130	-1 %
2	Kopi	220	150	-30 %
3	Batubara	115	95	-17 %



SRG Simalungun Siap Mengalun

Gudang SRG di Kabupaten Simalungun ditargetkan dapat beroperasi pada Juni 2013

Harus diakui, gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang terletak di Kab. Simalungun belum dapat difungsikan. Padahal, gudang tersebut secara fisik sudah berdiri pada tahun 2011 yang di bangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011.

Mengapa demikian? Menurut Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kab. Simalungun, Roland Batubara, secara fisik pembangunan gudang memang sudah selesai di bangun pada tahun 2011. Tapi, dari pihak kontraktor terjadi keterlambatan pengerjaan untuk kelengkapan alat dan infrastruktur penunjang gudang.

“Hal itu tentu saja membuat gudang tidak dapat beroperasi. Nah, karena pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati, pihak kontraktor dikenakan denda Rp 250 juta dan dana tersebut sudah dikembalikan ke negara,” ungkap Roland Batubara, di sela-sela acara Pembukaan Pertemuan Teknis SRG tahun 2013 di Hotel Jayakarta, Jakarta, 29 April 2013 lalu.

“Jadi keterlambatan implementasi gudang SRG di Kab. Simalungun bukan dikarenakan ketidaksiapan pemerintah

daerah. Tapi dikarenakan serah terima gudang dari pihak kontraktor yang tidak sesuai dengan jadwal,” jelas Roland.

Yang menjadi kabar baiknya, Roland mengatakan, diperkirakan SRG di gudang yang terletak di Kab. Simalungun, Kec. Purba ini, akan beroperasi pada bulan Juni 2013 mendatang. Pasalnya, saat ini pihaknya masih menunggu proses perizinan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti). “Nantinya, Pemerintah Daerah akan bekerjasama dengan PT Agromadear bekerjasama dan PT Pertani (Persero) untuk mengelola gudang tersebut dalam skema SRG,” katanya.

Lebih jauh dikatakan Roland, keberadaan gudang SRG di Kab. Simalungun sangat strategis untuk menggairahkan petani, khususnya petani jagung dan kopi yang potensial di wilayah tersebut. “Apa lagi lokasi gudang yang luasnya mencapai 10 hektar, cukup strategis terletak di jalur lintas utama antara Pematang Siantar dengan Kab. Kaban Jahé,” katanya.

Petani jagung setempat, kata Roland, cukup antusias dengan hadirnya gudang SRG di Kec. Purba ini. Pasalnya, selama ini ketika masa panen berlangsung harga cenderung turun. Dan, para tengkulak

banyak yang memanfaatkan petani saat panen raya dengan membeli komoditas pertanian dengan harga rendah sehingga petani dirugikan.

Dengan beroperasinya gudang SRG ini, kata Roland, diharapkan akan menjadi solusi mengatasi kesulitan petani untuk mendapatkan modal saat memulai musim tanam. Petani yang menyimpan hasil pertaniannya saat panen raya di gudang akan mendapatkan bukti atau resi penyimpanan hasil pertanian. Resi ini bisa menjadi surat berharga untuk mengajukan kredit ke lembaga perbankan saat petani kesulitan mendapatkan modal untuk menghadapi musim tanam

Kendati demikian, Roland berharap, sebelum diterbitkan Resi Gudang, pihaknya masih mengharapkan Bappebti untuk menyelenggarakan sosialisasi SRG kepada masyarakat di Kab. Simalungun.

“Sosialisasi itu diharapkan bisa menghadirkan seluruh stakeholder, sehingga ketika gudang sudah beroperasi masing-masing pihak memahami posisi dan tanggungjawabnya,” pungkas Roland Batubara. ▲



SRG Tasikmalaya Berkemas

Diharapkan implementasi gudang SRG di Kabupaten Tasikmalaya dapat segera terwujud, sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk membantu peningkatan perekonomian daerah. Salah satunya, menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Ismadjaja Toengkagie, yakni melalui pembangunan gudang primer di Kabupaten Tasikmalaya.

“Gudang yang diperuntukkan untuk skema Sistem Resi Gudang (SRG) tersebut, telah selesai pembangunannya pada akhir tahun 2012 dan dibangun dengan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012,” kata Ismadjaja, mewakili Kepala Bappebti saat menghadiri Peresmian dan Penyerahan Gudang SRG sekaligus Sosialisasi SRG di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu, 20 April 2013 lalu.

Maka, kata Ismadjaja, dengan selesainya pembangunan gudang tersebut, maka secara resmi Kemendag melalui Bappebti secara resmi menyerahkan gudang tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya. Hadir dalam peresmian dan penyerahan gudang SRG tersebut diantaranya dihadiri Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, pejabat Bappebti, anggota DPRD Kabupaten Jawa Barat, Perwakilan PT. Kliring Berjangka Indonesia, Perwakilan PT Pertanian, Perwakilan PT Pos Indonesia, Para Tokoh Masyarakat kab Tasikmalaya, Ketua Kelompok Tani dan Koperasi di Kab Tasikmalaya.

Peresmian gudang SRG itu juga ditandai dengan penandatanganan Prasasti oleh Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum. Dan juga digelar sosialisasi SRG kepada para petani dan kelompok tani yang ada di Tasikmalaya dan sekitarnya dengan pembicara dari Bappebti, Bank BJB dan PT Pertanian.

“Peran Pemda adalah memberikan dukungan melalui kemudahan perizinan maupun sosialisasi, serta pemahaman teknis dari para pelaku usaha yang terlibat dalam SRG juga sangat dibutuhkan,”



Kepala Biro Pasar Fisik & Jasa, Ismadjaja Toengkagie menandatangani prasasti SRG Tasikmalaya.

jelas Ismadjaja.

Lebih jauh dikatakan Ismadjaja, kami berharap Kabupaten Tasikmalaya dapat segera menerapkan skema SRG dan mendapatkan manfaat dari SRG seperti yang telah dirasakan daerah lain di Jawa Barat, mengingat manfaat ekonominya bagi daerah sangat besar.

“Efisiensi perdagangan dapat tercapai bila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedia dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha, terutama petani dan usaha kecil dan menengah (UKM),” papar Ismadjaja.

SRG 2013

Gudang SRG di Kab. Tasikmalaya memiliki luas 4.340 m² dengan kapasitas 800 ton yang dilengkapi dengan mesin pengering dengan kapasitas 10 ton. Gudang ini tepatnya berada Desa Karang Sambung, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut Pelaksana Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kab. Tasikmalaya, Amran Saefullah, secara fisik bangunan tersebut memang telah selesai dilaksanakan, namun secara operasional belum dapat berjalan.

Amran mengatakan, untuk operasionalisasi SRG diperlukan SDM pengelola yang handal dalam bidang

kewirausahaan dan memahami bisnis komoditi pertanian terutama beras. “Sehingga dalam waktu dekat akan diadakan seleksi pengelola SRG yang berasal dari masyarakat petani. Yaitu, petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi petani di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Amran.

Selain dari pada SDM pengelola, tambah Amran, sebelum dioperasionalkan SRG perlu juga diperhatikan SOP (standard operasional prosedur) sebagai pedoman dan aturan bagi pengelola SRG. Dengan adanya SOP, siapa pun nanti pengelola SRG akan mempunyai panduan untuk operasionalisasi SRG. “Sehingga diharapkan pengelolaannya akan tertib dan sesuai harapan kita bersama.”

Rencananya, kata Amran, gudang SRG di Kab. Tasikmalaya ini ditargetkan akan mulai dioperasionalkan pada tahun 2013 dan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

“Dalam rangka persiapan operasional akan dilakukan rekrutmen SDM, tentunya harus diprioritaskan kesempatan untuk masyarakat lingkungan sekitar SRG. Sehingga masyarakat sekitar akan merasakan manfaat keberadaan SRG dan mempunyai rasa memiliki keberadaan SRG itu sendiri,” tandas Amran. ▲



Denyut PLKA Riau dari 'Mati Suri'

Bersumber dari dana APBD, Pemerintah Provinsi Riau targetkan gelar PLKA sebanyak empat kali di tahun 2013.



Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Riau, Ayub Khan.

Kran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2013 resmi ditutup untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) di Provinsi Riau. Untuk diketahui, kebijakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan tersebut, lantaran kegiatan pasar lelang di Riau dinilai cenderung jalan di tempat alias tidak berkembang.

Namun, hal itu rupanya tidak menyurutkan semangat Pemprov. Riau untuk dapat menggelar PLKA pada tahun ini. "Pada tahun 2013 ini akan diselenggarakan PLKA sebanyak 4 (empat) kali yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau," ungkap Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Riau, Ayub Khan, dalam acara sosialisasi PLKA dan Sistem Resi Gudang (SRG), di Hotel Arya Duta, Pekanbaru, April lalu.

Ayub juga menegaskan, kegiatan ini harus terus aktif dilakukan. Nantinya, kata Ayub, dalam penyelenggaraan PLKA diperlukan pengawasan kepada penjual dan pembeli agar tidak terjadi

gagal serah. "Dengan adanya program tersebut, diharapkan agar dalam proses lelang terjadi transaksi yang benar."

Selain itu, kata Ayub, penjual dan pembeli harus dipetakan untuk mengatur penyelenggaraan PLKA sehingga dibutuhkan data untuk membangun frame yang jelas. Adapun untuk komoditi yang nantinya akan ditransaksikan, Ayub menjelaskan, akan memasarkan beberapa produk unggulan daerah disamping produk olahan yang telah dikemas oleh pelaku UKM.

"Mereka yang dilibatkan adalah kelompok petani yang terlibat langsung di lapangan dari 12 kabupaten/kota. Selain komoditas unggulan ada display (pameran) produk dari masing-masing kabupaten. Selain itu juga sebagai pembelajaran bagi petani tentang proses pemasaran baik melalui lelang maupun melalui Misi Dagang Koneksitas," paparnya.

Di samping itu, Ayub mengatakan, Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dapat melaksanakan hal yang sama dan bersinergi dengan Provinsi dan Kementerian Perdagangan dalam upaya meningkatkan pemasaran dan pendapatan para petani baik di sek-

tor perkebunan, pertanian, dan perikanan.

Ayub juga berharap, agar pembeli dan penjual bisa maksimal dalam melaksanakan transaksi, maka peran Gapoktan (gabungan kelompok tani) sangat penting pada even PLKA yang dilaksanakan di tingkat Provinsi maupun yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

"Untuk sarana pendukung pasar lelang telah disediakan fasilitas oleh pemerintah. Perlu ada penyebaran informasi acara lelang baik secara tertulis maupun visual untuk sosialisasi pasar lelang," tandas Ayub.

Komoditi Potensial

Di Provinsi Riau, terdapat beberapa komoditas yang menjadi prioritas utama dalam mendukung pelaksanaan PLKA ataupun Sistem Resi Gudang (SRG). Diantaranya, beras (gabah), jagung, karet, kopi, kelapa dan kakao. Adapun untuk komoditi kopra dan gambir juga mulai merambah masuk dalam komoditi yang ditransaksikan dalam PLKA.

Secara umum, struktur ekonomi Prov. Riau memang sangat didominasi oleh sektor yang berkaitan dengan migas seperti sektor pertambangan dan industri. Namun apabila unsur migas dikeluarkan dari perhitungan perekonomian Prov Riau, maka sektor pertanian menjadi salah satu motor penggerak dan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Provinsi ini.

Tercatat, pada awal tahun 2007 potensi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura cukup besar dimana untuk penggunaan lahan sawah sebesar 278.876 Ha dan bukan lahan sawah 1.120.177 Ha, dari luas 8.915.016 Ha. Realisasi luas tanam padi



sampai awal tahun 2007 seluas 114.612 Ha.

Meskipun Prov. Riau bukan merupakan daerah produksi gabah, namun beberapa daerah masih dapat diandalkan untuk menghasilkan gabah untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Bahkan, Pemerintah Prov Riau telah mencanangkan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) sebagai tindak lanjut program ketahanan pangan nasional dalam rangka mewujudkan swasembada beras di Provinsi Riau

pada tahun 2013.

Selain itu, perkebunan di Prov. Riau mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik pada tingkat nasional maupun regional. Perkembangan kegiatan perkebunan di Provinsi Riau menunjukkan trend yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan dan meningkatnya produksi rata-rata pertahun, dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa, karet, kakao dan tana-

man lainnya.

Kebun kelapa sawit masih mendominasi perkebunan di Provinsi Riau. Pada tahun 2006 s.d 2013 luas kebun kelapa sawit di Provinsi Riau adalah seluas 1.530.150,39 Ha. Disamping kelapa sawit masih banyak lagi jenis perkebunan, antara lain kelapa, karet, kopi, kakao dan lain-lain. Luas kebun kelapa di Provinsi Riau seluas 475.556,13 Ha, karet seluas 514.469,72 ha, kopi seluas 10.816,43 Ha dan kakao seluas 5.586,18 Ha. ▲

Luas Areal dan Jumlah Produksi Komoditi Unggulan Kabupaten/Kota

No.	KABUPATEN/ KOTA	PADI		JAGUNG		SINGKONG/ UMBI	
		LAP	JP	LAP	JP	LAP	JP
1.	Kuantan Singingi	9.412	30.517	219	470	369	3.760
2.	Indragiri Hulu	4.608	13.577	966	2.045	398	3.707
3.	Indragiri Hilir	30.721	103.911	5.417	12.333	286	3.666
4.	Pelalawan	9.844	30.618	4.928	11.162	251	2.426
5.	Siak	5.860	18.717	366	784	222	4.709
6.	Kampar	8.980	25.900	1.218	2.672	849	10.631
7.	Rokan Hulu	14.763	36.325	1.351	2.967	628	4.923
8.	Bengkalis	10.473	33.245	227	487	479	5.122
9.	Rokan Hilir	36.895	123.714	515	1.106	271	3.520
10.	Pekanbaru	0	0	128	274	238	2.344
11.	Dumai	4.621	12.846	204	428	217	3.078
	TOTAL	136.177	429.380	15.539	34.728	4.208	47.586

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Riau 2012, Keterangan : LAP = Luas Areal Produksi (Ha) JP = Jumlah Produksi (Ton)

Jumlah Produksi Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Kopi Tahun 2012

No.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PRODUKSI (ton)			
		KLP. SAWIT	KELAPA	KARET	KOPI
1.	Kuantan Singingi	147.355,57	2.315,20	145.740,40	247,61
2.	Indragiri Hulu	143.322,40	1.467,74	37.747,70	301,70
3.	Indragiri Hilir	42.656,88	358.860,97	1.983,06	643,30
4.	Pelalawan	144.063,12	30.745,79	18.675,60	178,20
5.	Siak	254.005,49	3.288,65	16.054,02	399,56
6.	Kampar	398.553,00	2.080,00	42.198,00	175,00
7.	Rokan Hulu	265.634,20	971,80	61.619,00	152,00
8.	Bengkalis	189.697,41	52.558,86	35.763,25	1.229,56
9.	Rokan Hilir	152.597,30	3.109,80	16.169,00	474,00
10.	Pekanbaru	0	0	0	0
11.	Dumai	40.645,20	862,60	931,58	0
	R A K Y A T	1.778.530,57	456.261,41	376.881,61	3.803,93
	P B N	309.151,19	-	16.867,00	-
	P B S	2.571.582,11	-	22.157,07	-
	TOTAL	4.659.263,87	456.261,41	415.905,68	3.803,93

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Riau 2012



Agenda Foto



Mendag, Gita Wirjawan, didampingi Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya dan Sekjen Kemendag, Gunaryo, mengunjungi gudang SRG rumput laut Kospemindo di Kawasan Industri Makassar. Dalam kesempatan itu Mendag menyampaikan harapannya terhadap pengembangan industri hilir rumput laut di tanah air. **Makassar, 8 April 2013.**



Kepala Biro Pasar Fisik & Jasa Bappebti, Ismajaja Toengkagie, bersama Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, disambut dalam peresmian dan penyerahan gudang SRG Tasikmalaya. Pada kesempatan itu Ismajaja menyampaikan sambutan dan harapan berkembangnya SRG Tasikmalaya. **Tasikmalaya, 20 April 2013.**



Bappebti dan pelaku SRG terdiri dari Pengelola Gudang dan perbankan selenggarakan sosialisasi SRG bagi petani, Poktan dan Gapoktan. **Jakarta, 20 April 2013.**



Bappebti selenggarakan sosialisasi SRG kopi di gudang PT. Gunung Lintong, Medan, Sumut. Gudang kopi milik swasta tersebut menjadi gudang penyimpanan komoditi kopi dalam skema SRG. **Medan, 24 April 2013.**



Skertaris Bappebti, Nizarli, menyampaikan sambutan dalam pelatihan teknis wakil pialang berjangka bagi perusahaan pialang untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi. **Pontianak, 18-19 April 2013.**



Bappebti menyelenggarakan ujian profesi Wakil Pialang Berjangka dari perusahaan pialang di wilayah Jakarta, Bandung, Solo, Semarang dan Surabaya. Ujian profesi tersebut diikuti sebanyak 63 peserta. **Makassar, 5-6 April 2013.**

2013 Ditaregtkan Berdiri 6 JFX Corner



Jakarta Future Exchange (JFX) menargetkan pada tahun 2013 berdiri sebanyak enam JFX Corner di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Berdirinya JFX Corner itu dengan menggandeng perusahaan pialang perdagangan berjangka.

Direktur JFX M. Bihar Sakti Wibowo, mengatakan, saat ini telah terdapat sebanyak delapan JFX Corner di berbagai

perguruan tinggi. Dan, JFX Corner yang ke sembilan yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Kecucwara, yang merupakan hasil kerja sama dengan PT Victory International Futures.

“Berdirinya JFX Corner diberbagai perguruan tinggi diarahkan untuk edukasi di kalangan mahasiswa dan juga para tenaga pendidik. Selain itu, JFX Corner juga merupakan berfungsi sebagai media

informasi terkait aktivitas perdagangan berjangka komoditi di JFX,” ujar Bihar.

Namun lebih jauh dijelaskan Bihar, JFX Corner yang berada di perguruan tinggi bukan sarana transaksi perdagangan berjangka sebab tujuannya hanya sebagai sarana edukasi. “Kalau mau transaksi harus melalui pialang berjangka.”

Di sisi lain dikatakan Bihar, JFX Corner juga penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang perdagangan berjangka. Dengan meliknya mahasiswa terhadap instrumen perdagangan berjangka maka saat memasuki dunia kerja sudah memiliki wawasan di industri perdagangan berjangka komoditi.

“Peningkatan kemampuan SDM di bidang perdagangan berjangka menjadi lebih strategis berkaitan dengan pelaksanaan ASEAN Economy Community yang berlangsung pada 2015. Jika tidak dipersiapkan sejak dini, SDM kita akan tersaingi dari negara-negara tetangga,” papar Bihar. ▲

Duet Deddy–Sherman Janjikan Perubahan JFX

Deddy Saleh, mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Sherman Rana Krishna, dinyatakan lulus fit and proper test oleh Bappebti sebagai calon Komisaris Utama dan Direktur Utama Jakarta Futures Exchange (JFX). Kepastian dua tokoh itu didasarkan SK Kepala Bappebti No. 46/BAPPEBTI/SD/03/2013, tanggal 11 Maret 2013, perihal Persetujuan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta.

Sementara itu, rapat umum pemegang saham (RUPS) JFX yang diselenggarakan pada Rabu, 17 April 2013, dengan suara bulat menerima dan menetapkan Deddy Saleh sebagai Komisaris Utama JFX dan Sherman Rana Krishna sebagai Dirut JFX.

Masuknya Deddy Saleh sebagai Komisaris Utama JFX, menggantikan Hasan Wijaya sedangkan Sherman Rana Krishna, mengisi jabatan Dirut JFX yang kosong setelah ditinggalkan Made Soekarwo sejak tanggal 21 November 2012 lalu.

Menurut Deddy Saleh, diterimanya jabatan Komisaris Utama JFX karena dilandasi dua hal. Pertama, melanjutkan misi yang belum tuntas selama menjabat di Bappebti.

“Secara fundamental industri ini seharusnya sudah berkembang pesat. Sebab, perangkat hukum dan perundang-undangan sudah cukup mendukung. Sebelum amandemen, subjek kontrak berjangka komoditi harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Tetapi sekarang, cukup diputuskan oleh Kepala

Bappebti. Selain itu, subjek kontrak berjangka komoditi tidak hanya berbentuk komoditi primer, melainkan produk-produk keuangan pun bisa dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka,” jelasnya.

Bahkan, tambahnya, kontrak berjangka yang tanpa wujud pun bisa diperdagangkan bursa berjangka, seperti Co2 atau emisi carbone. “Saya pikir Indonesia pun perlu ke arah itu, agar hutan kita yang demikian luas tetap terjaga dan Indonesia berkontribusi menurunkan pemanasan global.

“Alasan kedua. Ada dukungan kepada saya dari Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan bursa berjangka sebagai price reference dari sejumlah komoditi primer Indonesia,” tegas Deddy Saleh. ▲

'Duo Sri' Bappebti Dilantik Mendag

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Selasa (30 April 2013), melantik sejumlah pejabat di jajaran Kementerian Perdagangan untuk posisi Eselon II, III dan IV. Di antara pejabat yang dilantik itu, terdapat sejumlah pejabat Eselon II Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Diantaranya pejabat Bappebti yang dilantik itu yakni, Sri Haryati dilantik Mendag Gita Wirjawan menjadi Kepala Biro Hukum Bappebti, menggantikan Alfons Samosir yang memasuki masa pensiun.

Selanjutnya, Sri Nastiti Budianti, dilantik menjadi Kepala Biro Perniagaan Bappebti. Sri Nastiti Budianti menggantikan Robert James Bintaryo yang menggantikan posisi Nizarli sebagai Sekretaris Bappebti. Sedangkan



Nizarli memasuki masa pensiun.

Dari pejabat Bappebti yang dilantik Mendag tersebut, terdapat tiga jabatan yang dipromosikan menjadi Eselon II yakni Sri Haryati, sebelum menjabat Kabag Pelayanan Hukum, Biro Hukum Bappebti. Di posisi kedua yakni Sri Nastiti Budianti, sebelumnya tercatat sebagai staf khusus Bappebti.

Dan yang ketiga yakni, Mardjoko yang dilantik menjadi Kepala Biro Analisis Pasar, menggantikan Chrisnawan Triwahyuardhianto yang juga memasuki masa pensiun. Sebelumnya Mardjoko tercatat sebagai Direktur Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan, Ditejen Perdagangan Luar Negeri.



JFX Tambah Produk Tingkatkan Likuiditas

Jakarta Future Exchange (JFX) hingga akhir tahun 2013 ditargetkan meluncurkan lebih banyak lagi subjek kontrak berjangka multilateral. Diantara subjek kontrak multilateral itu terdapat komoditi pertambangan yakni batubara. Dan kontrak batubara tersebut menjadi pilihan prioritas untuk segera diperdagangkan JFX.

“Selain kontrak batubara, ada kontrak karet, kopi, minyak sawit mentah (crude palm oil- CPO), jagung, gula dan kedelai,” kata Direktur BBJ Bihar Sakti Wibowo di Jakarta, belum lama ini.

Dia menuturkan, JFX akan menyeleksi kontrak berjangka komoditas primer yang merupakan komoditas unggulan Indonesia. “Kita akan menyeleksi yang paling siap dan mendesak untuk masuk ke JFX. Hal ini penting untuk lindung nilai,” kata dia.

Selain itu, JFX juga akan mengem-



bankan kontrak produk keuangan seperti kontrak berjangka berbasis ASEAN currencies, stock index, bond dan interest rate. “Pengembangan produk ini sebagai wujud mengikuti trend bursa global.”

Di sisi lain dikatakan Bihar, dalam kaitan meningkatkan likuiditas pasar, JFX juga akan melakukan restrukturisasi keanggotaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi anggota bursa. Sebagai gambaran, saat ini, anggota di BBJ berkisar 100-an.

“Di samping itu, kita juga akan mengundang perusahaan-perusahaan besar termasuk perusahaan BUMN pertambangan serta perkebunan untuk masuk menjadi anggota bursa. Dan tidak tertutup kemungkinan kita akan mendorong funds manager maupun trader individual baik dari dalam negeri maupun dari luar untuk bertransaksi di JFX,” ungkap Bihar. ▲

Harga Karet Jambi Dikendalikan Tengkulak



Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian Provinsi Jambi, Filda Defriani, menjelaskan, turunnya harga karet di wilayahnya itu disebabkan dua hal. Diantaranya, krisis ekonomi dunia. Dan, persiangan kualitas karet dari negara tetangga pesaing yang juga memproduksi karet seperti Thailand dan Malaysia.

Kedua negara itu, saat ini juga masih menggunakan indikasi harga karet dari Singapura. "Saat ini, Kementerian Perindustrian Perdagangan sedang membahas dengan 2 negara lainnya itu untuk membuat kesepakatan agar pedoman harga ditetapkan ke negara masing-masing. Saat ini sedang dibahas oleh tim dari 3 negara itu. Tujuannya agar nilai yang didapatkan petani lebih tinggi," jelasnya.

Diterangkannya dalam kesempatan itu, dari nilai harga indikasi yang harusnya 100 %, saat diekspor akan turun nilai yang diperoleh petani menjadi 85 %. Menurut Filda, 15 % itu dipotong sebagai biaya transportasi.

"Sebab, dari dermaga pelabuhan Talang Duku, diantar produk itu ke ambang luar dan kemudian baru diimpor ke Singapura. Nah, transportasi ini dihargai 15 %. Makanya harga kita dapatkan hanya 85 % dari harga Singapura," ujar Filda Defriani.

Sementara itu, harga karet di tingkat petani berkisar Rp 8.000 per kg. Seperti diutarakan Hasan, warga Tambun Arang, harga getah karet di wilayahnya berkisar Rp. 8000 per kg, turun dari harga sebelumnya Rp 11.000 per kg.

Menurut Hasan, harga karet bervariasi dan tergantung dari tengkulak. "Saat ini harganya ada yang Rp 9.000 per kg ada juga yang Rp 8.000 per kg. Namun, tidak ada yang melebihi harga Rp 9.000 kecuali harga lelang karet. "Kemungkinan kalau harga lelang masih berkisar Rp 10 ribu," ujar Hasan. ▲

Harga Jagung Lokal Naik, Insentif Bagi Petani

Permintaan jagung untuk industri pakan ternak mengalami kenaikan. Kondisi ini mendorong harga jual jagung berkisar Rp 3.300 hingga Rp 3.400 per kg. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jagung tahun 2012 lalu mencapai 19,38 juta ton. Sedangkan kebutuhan jagung industri pakan ternak diperkirakan mencapai 7 juta ton.

"Kenaikan harga jagung ini merupakan insentif besar bagi petani dan menjadi motivasi untuk menggenjot produksi," ujar Sekertaris Dewan Jagung Nasional, Maxdeyul Sola, baru-baru ini.

Namun Sola mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan angka produksi yang tertera di kertas. Saat ini kebutuhan jagung industri rerata mencapai 600 ribu ton per bulan. Keterse-

diaan jagung kebutuhan pabrik pakan menurutnya belum stabil. "Sebab, pabrik membutuhkan jagung sepanjang tahun, sedangkan proses produksi hanya bisa dilakukan di bulan-bulan tertentu. Karena itu pemerintah perlu mencari solusi agar kebutuhan pabrik bisa terpenuhi meskipun bukan musim panen raya."

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak, Sudirman, mengatakan jagung merupakan sumber karbohidrat utama untuk unggas. Walaupun produksi jagung tinggi, industri masih membutuhkan impor untuk menambal kebutuhan pada musim bukan panen.

"Tahun 2012 lalu impor jagung mencapai 1,5 juta ton. Namun, industri pakan ternak tetap mengutamakan jagung produksi dalam negeri dibanding jagung impor," imbuh Sudirman. ▲

Harga Lada Lokal Lebih Tinggi Dibanding Ekspor



Ketua Kelompok Tani Lada "Margo Utomo" Desa Kedarpan, Marjono mengatakan, harga lada hitam di tingkat petani saat ini sangat menggairahkan mencapai Rp 85 ribu di pasar lokal harganya lebih dari itu. Dan ada kemungkinan bisa mencapai di atas Rp 90 ribu per kg.

Sementara itu, harga lada yang ditawarkan eksportir di Siduarjo, Jatim hanya Rp 76 ribu per kg. Petani juga harus menanggung ongkos transportasi untuk menyetorkan hasil panen ke Siduarjo harus ditanggung petani, Disamping itu eksportir juga menuntut kualitas super.

Di pihak lain, Executive Director International Pepper Community (IPC), Kannan, mengatakan, Indonesia merupakan negara terbesar kedua produksi lada setelah Vietnam. IPC sebagai organisasi nirlaba di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bermaksud ingin memacu petani lada Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar dunia.

"Prospek pasar lada ini cerah sekali, terutama lada hitam. Karenanya kami ingin memotivasi petani lada Indonesia untuk meningkatkan produksi lada hitam, dengan memberikan pelatihan-pelatihan," ujar Kannan. ▲

Petani lada Desa Kedarpan, Kec. Kejobong, Purbalingga, Jateng enggan mengekspor lada hitam. Sebab harga yang ditawarkan eksportir masih terlalu rendah dan lebih rendah dari harga pasar lokal. Saat ini harga lada hitam di tingkat petani Purbalingga relatif cukup tinggi berkisar Rp 85 ribu per kg, sementara eksportir menawar sekitar Rp 75 ribu per kg.



Grobogan is The Standard for National Corn Trading.

Establishing corn commodity price on normal stage, government encourages all farmers of corn commodity in Grobogan Regency, Central Java can provide the supply for animal food company. On the other side, the quality and type of corn commodity need to meet the requirement from animal food company.

"If these two things can be provided by the corn farmer from Grobogan Regency, I can assure you that the price of corn commodity will be at the normal stage, around IDR 3,000 per kg," Bayu Krisnamurthi, the vice minister of Trading explained in the middle of animal food industry people dialogue in Semarang, Central Java, some times ago.

Moreover Bayu also said that animal food industry in Central Java has committed to purchase the Grobogan's farmer corn commodity above the production charge. With the requirement that corn quality has to meet the need of animal food industry, for example is the water level around 15%.

According to Bayu, with the commitment from animal food company and referring to the potency of corn commodity plant in Grobogan Regency, in the future, Grobogan Regency with the support from

the production of the surrounding area will become the standard for corn commodity trading in the country.

"We need to have a national standard for corn commodity price therefore I'm hoping that it will be happened in Grobogan Regency. This area has big potency with the corn commodity plants and animal food industry is situated near Grobogan Regency," Bayu explained.

On his explanation, he said that the first step to build Grobogan Regency as the standard for corn commodity price is to create online trading system. That system is integrated starting from the farmer, the corn commodity warehouse receipt system, until the animal food industry consumer.

"By using the system, we will know the corn supply at WRS's warehouse, and on the other side we also will know the position of corn farmer whether they are in planting season or harvest season."

"If we are able to create that system, I think it will be an effort to decrease our dependency on corn import. Therefore it must have price guarantee for the farmer to be more motivated on planting good quality corn." Baru Krisnamurthi explained. ▲

Coftra Demanded the Fulfillment of Promises From Province Government of ACAM Executor



The Chief of Coftra Service and physical market Bureau, Ismadjaja Toengkagie, on the technical meeting opportunity of Agro Commodity (ACAM), on the 26th of March 2013, said that Coftra asked government commitment towards ACAM development. If the local government does not have a commitment, Coftra will shutdown ACAM in that area.

On the other side Ismadjaja said that 8 ACAM that have not been revitalized which are in the Province of West Sumatra, Jambi, Lampung, Yogyakarta, NTB, North Sulawesi, South East Sulawesi and Gorontalo, will be prepared for the revitalization process in 2014.

To make the revitalization program easier and faster, Ismadjaja explained that Coftra will give a module for ACAM revitalization execution that will be used as a reference for each area to organize ACAM revitalization structure for their area.

"Some of the references are National Regulation Policy, Trading Rules and Agreement scheme," He explained.

Moreover, The Industrial & Trading Ministry Law No, 650/MPP/Kep/10/2004, in regards to regulation of auction market execution with next handover, will be revised at the latest end of 2013."

"The commencement of ACAM revitalization will be done with the funding synergy from APBN and APBD. Besides that, auction market executor has to be directed to independency so that the executor has to take some break through steps to cover operational charges and also able to develop their own business," Ismadjaja added. ▲

5 Obstacles of Low Exchange Liquidation



Coftra chief, Syahrul R Sempurnajaya on one opportunity explained 5 obstacles for multilateral contract transaction liquidation that has not been run yet. The first obstacle is the minimum of active participation from market people on performing the multilateral commodity transaction. From the 62 existing broker, only 53% are actively doing transaction. From 20 active traders, only 75% are doing primary commodity transaction.

Second obstacle is the minimum

knowledge and interest of commodity business people, producer, or investor on the use of risk management system for business protection. Third obstacle is the limit support and good cooperation between the future exchange and stakeholder, commodity association and university on socialization and education activity. The forth obstacle is on the limited handover place for physical handover in some production center area.

And the fifth obstacle is the law enforcement on PBK field that has not been maximum as the result of limited PPNS worker in Coftra.

"Therefore, in 2013, Coftra is coordinating with Indonesian Police head quarter will train and recruit PNS worker from several related department in some area to be Coftra PPNS," Syahrul explained. ▲

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN MARET 2013

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Resi Gudang Terbit	Nilai Barang (Rp)	RG Diagunkan	Nilai Pembiayaan (Rp)	Bank/LKCNB
1.	PT. PERTANI						
	- Cianjur *)	Gabah	9	208.687,5	7	518.800	Bank BJB
	- Probolinggo (Krasan) *)	Gabah	5	892.250	4	536.183	Bank JATIM
	- Makassar (Kospermindo)	Rumput Laut	1	528.000	1	277.200	Bank BJB
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	4	320.000	4	295.000	Bank BJB
	- Sidrap	Gabah	1	441.000	1	308.700	Bank BRI
	- Tuban *)	Jagung	5	149.050	3	66.000	Bank JATIM
	- Probolinggo (Banyuanyar)	Beras	3	448.500	2	193.200	Bank JATIM
		Gabah	2	356.900	1	150.500	Bank JATIM
		Jagung	1	83.160	1	58.212	Bank JATIM
JUMLAH		Gabah	22	2.278.837,5	17	1.809.183	
		Beras	3	448.500	2	193.200	
		Jagung	9	463.891	4	124.212	
		Rumput Laut	1	528.000	1	277.200	
TOTAL			35	3.719.228,5	24	2.403.795	

*Sumber: BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

Penerbitan Resi Gudang

Di bandingkan pada bulan Februari, penerbitan Resi Gudang pada bulan Maret 2013 lebih banyak dan tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota dengan komoditi yang juga lebih beragam. Penerbitan resi gudang dilakukan di 7 kabupaten meliputi Kab. Cianjur, Kab. Grobogan, Kab. Probolinggo, Kab. Indramayu, Kab. Sidrap, Kab. Tuban dan Kota Makassar. Penyimpanan komoditi pada periode Maret 2013 ini dilakukan oleh Petani/Pedagang, Kelompok tani dan Kooperasi.

Periode Maret terdapat 4 komoditi yang masuk disimpan dalam Gudang SRG, yaitu Gabah, Beras, Jagung dan Rumput Laut.

Pembiayaan Resi Gudang

Selain sebagai sarana penyimpanan barang, para pemilik Resi Gudang juga memanfaatkan Resi Gudang yang telah diterbitkan untuk memperoleh

pembiayaan dari bank. Tercatat pada bulan Maret 2013, dari 35 resi yang diterbitkan terdapat 24 resi yang memperoleh pembiayaan oleh Bank Jatim, Bank BJB dan Bank BRI dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,4 milyar atau rata-rata sebesar 70 % dari nilai resi gudang.

Pembiayaan itu diberikan dengan menggunakan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dengan bunga 6 % per tahun dan hanya dapat diberikan kepada petani, kelompok tani, gapoktan dan kooperasi. Beberapa Resi belum memperoleh pembiayaan karena penerbitan dilakukan pada akhir Maret, sehingga pembiayaan baru cair pada awal April 2013.

Pemberian pembiayaan di luar skema S-SRG (dengan suku bunga komersial/umum) sangat dimungkinkan sehingga SRG membuka peluang bagi pemilik barang maupun bank untuk memanfaatkan SRG sebagai suatu mekanisme untuk memperoleh pembiayaan secara optimal.

Ketersediaan Stok

Pada periode Maret 2013, terdapat 14 gudang yang menyimpan komoditi dengan status Resi Gudang aktif. Gudang-gudang tersebut tersebar di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang meliputi Kab. Indramayu, Kab. Cianjur, Kab. Jepara, Kab. Nganjuk, Kab. Lombok Barat, Kab. Pasaman Barat, Kab. Barito Kuala, Kab. Grobogan, Kab. Probolinggo, Kab. Tuban, Kota Makassar, Kab. Sidrap dan Kab. Pinrang.

Total volume komoditi yang tersimpan di gudang SRG sebesar 1.862,34 ton yang terdiri dari Gabah sebanyak 1.499,67 ton, Beras sebanyak 65 ton, Jagung sebanyak 201,67 ton dan Rumput Laut sebanyak 96 ton. Penyimpanan komoditi tersebar di 13 kabupaten/kota dengan rincian seperti tampak pada tabel Ketersediaan Stok Komoditi Dalam Gudang SRG Bulan Maret 2013. ▲


**KETERSEDIAAN STOK KOMODITI DALAM GUDANG SRG
BULAN MARET 2013**

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	VOLUME KOMODITI (TON)			
		GABAH	BERAS	JAGUNG	KOPI
1.	Kab. Indramayu				
	- Haurgeulis (Pertani)	85,5			
2.	Kab. Cianjur				
	- Warungkondang (Pemkab)	143,42			
3.	Kab. Jepara				
	-- Pecangaan (Pemkab)	7,95			
4.	Kab. Nganjuk				
	- Rejoso	200,5			
5.	Kab. Lombok Barat				
	- Kediri (Pertani)	405,2			
6.	Kab. Pasaman Barat				
	- Pasaman (Pemkab)			42,49	
7.	Kab. Barito Kuala				
	- Mandastana (Pemkab)	129,30			
8.	Kab. Grobogan				
	- Wirosari (Pemkab)			77,23	
9.	Kab. Probolinggo				
	- Krasan (Pemkab)	307,5			
	- Banyuwang	83	65	35,2	
10.	Kab. Tuban				
	- Semanding (Pemkab)	12		46,75	
11.	Kota Makassar				
	- KIMA				96
12.	Kab. Sidrap				
	- Maritengae	105			
13.	Kab. Pinrang				
	- Watang Sawito (Pemkab)	20,3			
TOTAL		1.499,67	65,00	201,67	96

*Sumber: BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



Persiapan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang

PART II



Pengantar Redaksi; Melengkapi artikel dari edisi sebelumnya, berikut ini dijelaskan prosedur dan persyaratan yang perlu dipersiapkan sebelum pengajuan pinjaman bank baik oleh kelompok tani maupun perorangan. Di samping itu, langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan gudang SRG.

Kelompok Tani

- Foto copy KTP Ketua dan Anggota Kelompok;
- Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang usaha Kelompok Tani;
- Surat Kuasa dari Anggota Kelompok kepada Ketua Kelompok;
- NPWP dari Anggota jika pinjaman di atas Rp 50 juta.

Perorangan/Pedagang

- Foto copy KTP;
- Foto copy SIUP, TDP;
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp 50 juta;
- Surat Keterangan dari Kepala Dinas setempat apabila usahanya belum berjalan 2 (dua) tahun.

Persiapan Pemerintah Daerah

Implementasi Sistem Resi Gudang di berbagai daerah pada dasarnya ditujukan untuk akan meningkatkan kesejahteraan petani/kelompok tani, koperasi-UKM serta pelaku lainnya seperti eksportir, prosesor, pedagang, lembaga perbankan/keuangan non-bank, jasa pergudangan di daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan ketahanan pangan wilayah.

Berkaitan itu, Pemerintah Daerah terutama Dinas Perdagangan atau pun Dinas Pertanian memiliki peran dan tugas yang sangat penting serta strategis dalam Pengembangan dan Peningkatan Implementasi Sistem Resi Gudang. Tugas dan peran Pemerintah Daerah yakni mencakup;

Pembinaan dan Fasilitas

Melakukan sosialisasi SRG pada tingkat kabupaten/kota, kelompok tani dan asosiasi, serta memberi pelatihan, bimbingan teknis serta monitoring di lapangan. Juga memberikan penyediaan sarana dan peralatan, berupa gudang, alat pengepakan, alat sortasi, dan lain-lain.

Mengingat sumber daya dan dana untuk mendukung implementasi Sistem Resi Gudang diberbagai instansi/lembaga pemerintah dan swasta di daerah, maka diperlukan sinergi bersama antar dinas daerah. Tidak kalah penting pula adalah upaya bersama dalam pengembangan komoditas unggulan daerah dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan



Penguatan Pelaku Ekonomi Usaha

Pemerintah Daerah juga diharapkan bisa meningkatkan kehandalan kelompok tani / produsen dan pelaku usaha, mendorong lembaga keuangan setempat (bank maupun non bank) untuk memfasilitasi petani /kelompok tani, koperasi dan UKM serta melakukan kerjasama intensif dengan pemangku kepentingan Sistem Resi Gudang di daerah yakni BUMN/BUMD, kadinda, asosiasi, sektor swasta, instansi terkait.

Pemantauan dan Koordinasi

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sistem Resi Gudang, peran Pemda juga sangat vital dalam pemantauan dan pengkoordinasian aktivitas Sistem Resi Gudang. Pemerintah Daerah diharapkan membuat kebijakan daerah untuk mempercepat perkembangan Sistem Resi Gudang seperti penguatan kelembagaan, peraturan yang mengiring para pihak mendukung Sistem Resi Gudang dan kebijakan yang memfasilitasi dan pembiayaan Sistem Resi Gudang, peningkatan mutu dan produktivitas.

Di samping itu memantau hambatan dan kendala di lapangan, memonitor perkembangan penanganan kasus yang terjadi, memfasilitasi pengembangan pasar lelang setempat, mengelola data dan informasi kondisi daerah: Gudang, pelaku usaha (eksportir, pedagang), kelompok tani/Gapoktan, perbankan, produk pertanian unggulan, dan lain-lain. Koordinasi Badan Pengawas Sistem Resi Gudang dan pemerintah daerah ini sebaiknya dilakukan secara berkala, setidaknya 3 bulan sekali.

Persiapan PEMDA dalam Pelaksanaan SRG

Di samping persiapan yang dijelaskan di atas, Pemerintah Daerah juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang mendukung terlaksananya Sistem Resi Gudang di daerah bersangkutan. Persiapan itu menyangkut koordinasi dengan instansi terkait dan menjalankan peran politiknya sebagai otoritas tertinggi di daerah. Hal-hal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah mencakup;

■ Identifikasi Potensi Komoditi Daerah

Mengkaji produksi (jumlah dan kualitas), konsumsi dan prioritas daerah atas komoditi yang dapat diresigudangkan serta letak lokasi-lokasi wilayah produksinya.

■ Kesiapan Pelaku Usaha

Mendata para pelaku usaha di daerah tersebut baik petani, kelompok tani maupun pelaku usaha lainnya (prosesor, pedagang, eksportir) yang dapat dipersiapkan untuk berperan serta dalam SRG dan membina mereka dengan sosialisasi dan bimbingan teknis atau pendampingan.

■ Kesiapan Gudang dan Sarana Pendukung (dryer, alat sortasi, dll) :

Melakukan identifikasi jumlah gudang yang ada serta lokasinya apakah di sentra produksi serta apakah gudang tersebut memenuhi syarat standar gudang yang berkualitas baik (SNI). Untuk lebih pastinya maka agar menghubungi pula LPK untuk inspeksi gudang. Hal itu guna melihat kondisi kesiapan infrastruktur gudang dan rekomendasinya yang nantinya mereka dapat memberikan sertifikasi gudang. Hingga saat ini, lembaga yang telah mendapatkan persetujuan Bappebti untuk LPK inspeksi gudang yakni PT. Bhandha Ghara Rekasa dan PT. Sucopindo.

Keberadaan Sarana Pendukung terutama dryer sangat penting pula karena alat tersebut untuk memperbaiki kualitas komoditi termasuk untuk meningkatkan daya tahan komoditi untuk dapat disimpan di gudang.

■ Pengelola Gudang:

Pemda menghubungi Pengelola Gudang yang sudah ditunjuk Bappebti untuk menjajaki kesiapan mereka untuk dapat beroperasi di wilayah tersebut. Jika terdapat calon pengelola gudang setempat yang berminat untuk menjadi Pengelola Gudang namun belum mempunyai persetujuan dari Bappebti, maka mereka dapat dibantu untuk mendaftarkan ke Bappebti sesuai dengan prosedur dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan.

■ Lembaga Penilaian Kesesuaian:

Pemda menghubungi LPK setempat yang berwenang untuk melakukan uji mutu komoditi guna membahas penyediaan kualitas mutu komoditi dari produsen setempat dan penanganan pasca panennya serta untuk mengetahui secara rinci prosedur uji mutu komoditi untuk SRG di daerah tersebut.

■ Lembaga Pembiayaan:

Pemerintah Daerah melakukan pertemuan dengan lembaga keuangan, terutama kepada lembaga keuangan yang telah mempunyai Petunjuk Teknis pembiayaan kredit untuk skema Sistem Resi Gudang. Hal itu guna memperoleh masukan kesiapan mereka dalam skema Sistem Resi Gudang, prosedur pencairan kredit yang cepat serta tingkat bunga yang kompetitif.

■ Lembaga Asuransi:

Sesuai peraturan, maka pihak Pengelola Gudang wajib mengasuransikan barang yang dikelolanya, untuk itu maka pihak Pemda dapat bekerjasama dengan Pengelola Gudang atau pihak Perbankan yang ada untuk mengidentifikasi pihak asuransi di daerah tersebut dengan biaya yang kompetitif.

■ Koordinasi & Sinergi Antar Stakeholders:

Jika identifikasi lapangan dan persiapan telah dilakukan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pertemuan dengan para Pelaku Usaha yang terdiri dari Petani/Kelompok Tani, koperasi, UKM, prosesor, eksportir, serta lembaga Pengelola Gudang, LPK, Pusat Registrasi, serta lembaga pembiayaan untuk membahas penjadwalan dan penyediaan operasional pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Pemerintah Daerah juga sebaiknya menginformasikan dan menghubungi pihak lembaga Pengawas- Bappebti dalam persiapan-persiapan implementasi Sistem Resi Gudang guna berkoordinasi terkait prosedur teknis skema Sistem Resi Gudang, kerjasama dalam program sosialisasi/bimbingan teknis Sistem Resi Gudang untuk pelaku usaha serta simulasi pelaksanaan teknis Sistem Resi Gudang serta persetujuan kelembagaan Sistem Resi Gudang. ▲



Hedging Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Fungsi ekonomi perdangan berjangka komoditi adalah sebagai sarana lindung nilai (**hedging**) serta sarana penciptaan harga (**price discovery**) serta sebagai rujukan harga (**reference of price**) yang transparan yang menjadi acuan harga dunia. Dengan perdagangan berjangka para pelakunya dapat mengalihkan risiko kerugian khususnya petani dapat melindungi produksinya dari fluktuasi harga. Namun, perdagangan berjangka selain sebagai alternatif investasi juga bersifat **'high risk high return.'**

***) Widiastuti,**
Kabag Pengawasan
Keuangan & Audit Biro
Perniagaan Bappebti

Hedging atau lindung nilai di industri perdagangan berjangka komoditi memiliki pengertian yakni membeli dan menjual kontrak berjangka untuk menutupi risiko atas perubahan harga di pasar spot (fisik). Hedging yang dilakukan dalam perdagangan berjangka merupakan bentuk lain dari kegiatan asuransi yang diciptakan berdasarkan mekanisme pasar yaitu dengan melalui pasar turunan atau derivative dari pasar fisiknya.

Dengan melakukan transaksi di dua pasar tersebut (*futures dan physic*) secara bersamaan dengan posisi yang berlawanan untuk jumlah dan jenis komoditi yang sama, maka kedua pasar akan saling menutupi kerugian yang diderita pada salah satu pasar. Dengan demikian perdagangan berjangka memberikan manfaat ekonomi berupa pengalihan risiko yang tidak diinginkan melalui kegiatan hedging dan merupakan sumber referensi harga yang dapat dipercaya (*price discovery*).

Dengan kegiatan lindung nilai menggunakan kontrak berjangka, hedger (dalam hal ini orang yang memanfaatkan sistem tersebut seperti produsen, petani, dll) dapat mengurangi

sekecil mungkin dampak yang diakibatkan fluktuasi harga dari suatu komoditi.

Jenis-jenis Hedging

Secara garis besar penjelasan tentang hedging dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yakni *selling hedge* dan *buying hedge*;

Selling hedge; merupakan suatu tindakan mengambil posisi jual (*open sell*) di pasar berjangka, untuk melindungi turunnya nilai persediaan bahan baku atau komoditi yang akan dihasilkan sebagai akibat fluktuasi harga. Jadi kemungkinan rugi akibat turunnya harga di pasar fisik dapat dikompensasi dengan keuntungan yang diperoleh dari pasar berjangka (*futures*). Posisi yang dilakukan di pasar berjangka adalah menjual (*open sell*).

Selling hedge umumnya dilakukan oleh para petani, produsen atau para pengusaha di bidang perdagangan komoditi.

Buying hedge; merupakan tindakan mengambil posisi beli (*open buy*) di pasar berjangka untuk melindungi usaha dari kemungkinan kenaikan harga komoditi yang harus dibelinya di pasar fisik. Jadi kemungkinan rugi akibat naiknya harga di pasar fisik dapat



diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh pasar berjangka (*futures*).

Buying hedge umumnya dilakukan oleh para eksportir dan importer. Pabrikan pengolahan dan pemakai bahan baku untuk menjaga kontinuitas persediaan. Dengan demikian mereka membutuhkan bahan baku secara kontinu dan di tingkat harga yang wajar.

Manfaat hedging dalam perdagangan berjangka

Di dalam perdagangan berjangka, baik produsen (petani), maupun konsumen (pabrikan) mendapatkan manfaat dari *hedging* yang mereka lakukan. Di samping itu ada pihak lain yang mendapatkan manfaat dari transaksi perdagangan berjangka (*futures*), mereka disebut sebagai spekulan, karena mereka mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan beli, dari transaksi yang mereka lakukan.

Apabila harga di pasar berjangka cenderung naik, mereka membuka posisi beli (*buy*), kemudian setelah harga naik ditutup dengan jual (*sell*), tetapi apabila harga di pasar berjangka cenderung turun mereka membuka posisi jual, kemudian setelah harga turun ditutup dengan pembelian. Para spekulan inilah justru yang meramaikan perdagangan di pasar berjangka. Mereka tidak memikirkan produk komoditi, tetapi mereka murni ingin mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli, mereka biasa disebut dengan spekulan

Tinjauan Umum Hedging dalam transaksi SWAP

SWAP adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian tunai dengan pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian kurs (kurs bersifat tetap selama kontrak), sehingga dapat menghindari kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

Instumen hedging sering digunakan dalam transaksi SWAP, transaksi dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian berjangka yang dilakukan secara berkelanjutan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon serta kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi yang dilakukan.

Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli. Penggunaan transaksi SWAP sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang.

Para pihak dalam Hedging

Pada perdagangan berjangka komoditi pelaku hedging ini biasa disebut hedger, yang terdiri atas hedger pembeli (*hedge long*) dan hedger penjual. Hedger pembeli umumnya berencana akan membeli komoditas di pasar fisik di masa yang akan datang. Untuk melindungi transaksinya dari fluktuasi, misalnya kenaikan harga di masa mendatang, hedger membeli kontrak berjangka saat ini dengan posisi *buy* (beli).

Buying hedge pun demikian, umumnya yang mengambil posisi ini adalah kalangan eksportir, prosesor, pengguna bahan baku seperti pabrik, dan sebagainya. Fungsinya terutama menjaga kestabilan harga dan kontinuitas pa-

sokan. Hedger penjual atau *hedge short* adalah hedger yang akan menjual komoditas tertentu di pasar fisik di masa yang akan datang. Untuk melindungi harga penjualan komoditasnya, hedger akan membuka kontrak berjangka sekarang dengan posisi *short* (jual).

Selling hedge biasanya dilakukan oleh para produsen, terutama para petani, dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan penurunan harga komoditas pada waktu misalnya panen.

Perbedaan Spektakuler dan Hadger

Pihak yang berpartisipasi di pasar *futures* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *hedgers* dan *speculator*.

Hedgers adalah pihak yang memasuki sebuah kontrak untuk mencari perlindungan dari risiko perubahan harga. Sedangkan *speculator*, yaitu pihak yang memasuki kontrak dengan harapan bahwa risiko perubahan harga dapat mendatangkan keuntungan baginya.

Seorang hedger menghindari risiko dan melindungi dirinya dari adanya perubahan harga, sedangkan seorang *speculator* bersedia menampung risiko dan berani bertaruh guna mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dengan demikian hedgers memiliki strategi trading kebalikan dari spekulan. Hedger mencoba untuk menghilangkan risiko dalam rangka untuk mengunci harga dan menarik barang yang mereka produksi atau konsumsi. Sedangkan spekulan mengambil risiko untuk menerima keuntungan yang potensial.



Yuli Handayani, Branch Manager PT MGF

'Mesin Gress' MGF



Hijrah dan menetapnya Yuli Handayani ke PT. Megagrowth Futures (MGF) diharapkan mampu mendongkrak kinerja perusahaan.

Januari 2013 lalu, Yuli Handayani resmi bergabung dalam jajaran manajemen PT. MGF. Bak bursa transfer para pemain bola internasional, rupanya MGF tertarik mendatangkan wanita kelahiran 5 Juni 1984 ini, dengan harapan mampu merebut gelar menjadi salah satu perusahaan pialang terdepan dan teraktif di Indonesia.

"Saya dipercaya untuk membuat konsep baru di perusahaan lama yang telah di-setup baru ini," ungkap Yuli kepada **Buletin Berjangka**, di kantornya, H Tower Lt. 19 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta April lalu.

"Targetnya ingin mengangkat MGF, dan harapannya dapat dikenal oleh masyarakat luas," tambahnya.

Untuk mencapai target tersebut, beber Yuli, saat ini MGF telah didukung oleh

2 divisi. Pertama, divisi edukasi yang bertugas menjelaskan produk-produk MGF kepada nasabah. Lalu, kata Yuli, tim marketing hanya menjembatani agar nasabah datang ke kantor dan tim edukasilah yang menjelaskan produk-produk kita.

"Tim marketing juga berperan besar, tetapi hanya membantu secara administrasi saja," jelasnya.

Yang menarik dari perbincangan dengan Yuli terkait tenaga marketing, dia berpendapat dan berharap ke depannya tidak ada lagi tim marketing di MGF.

"Nah, ketika nasabah ingin trading, sudah ada tim edukasi kita yang akan menjelaskan produk-produk MGF, sehingga nasabah sudah bisa trading sendiri karena juga semua transaksi dilakukan secara online. Jadi kalau sudah seperti itu tidak ada lagi nasabah yang



komplain kepada tim marketing atau pun perusahaan,” paparnya.

Kedua, yaitu tim promosi yang bertugas untuk membranding MGF. Untuk branding, jelas Yuli, MGF menggunakan event, seminar, workshop dan lainnya yang berfungsi memperkenalkan perusahaan kepada calon nasabah. Namun, Yuli mengakui, “MGF saat ini memang belum membranding sama sekali, dan kita akan start bulan April ini.”

Bicara soal produk, MGF telah memiliki 3 produk. Yakni, commodity, currency dan index. “Kami aktif di produk currency, index, dan commodity khususnya gold. Tapi, yang lebih menonjol dari MGF yakni produk currency dan komoditi gold,” ujar Yuli.

Di sisi lain, Yuli mengatakan, manajemen MGF belum memiliki cabang di kota lain. “Tapi secepatnya kami rencanakan akan membuka kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia,” tegasnya.

Door to door

Jerih payah Yuli memulai karirnya di industri Perdagangan Berjangka Komodoti (PBK) baru dimulainya pada awal tahun 2007, atau tepatnya setelah ia lulus dari Fakultas Ekonomi di Universitas Pakuan Bogor.

“Saya memulainya di industri ini dari seorang marketing yang door to door,” kenang Yuli.

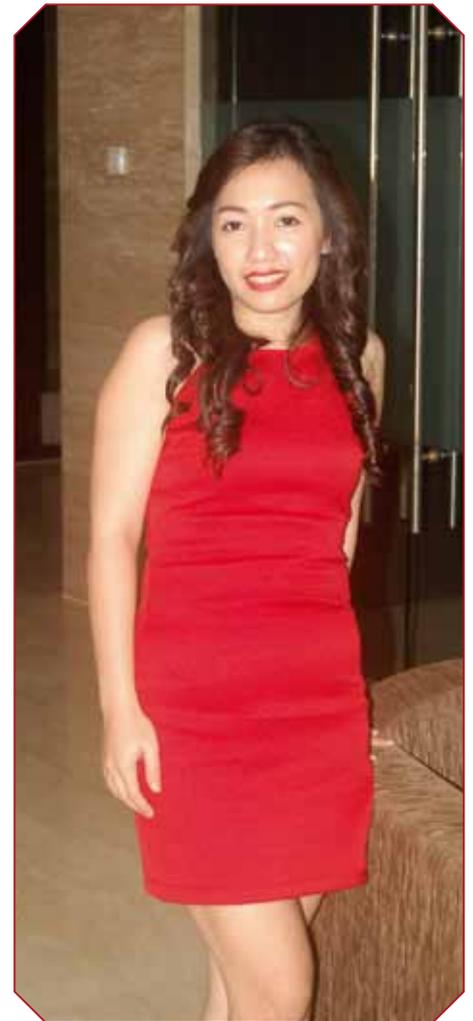
Lalu, tutur Yuli, sebelum resmi bergabung dengan MGF, dirinya telah berpindah kerja sebanyak tiga kali di perusahaan pialang yang berbeda. Dan, setiap berpindah perusahaan pialang, jenjang karir ibu dari Nadia Prianka ini terus naik.

“Terakhir saya menjabat Branch Manager PT Monex Investindo Futures (MIF) untuk cabang Bogor,” kisahnya.

Di MIF, rupanya prestasi Yuli cukup membanggakan. Apa saja? Yuli pernah meraih predikat margin dalam lebih 70 % selama 2 tahun terakhir. Selain itu, ia juga pernah menyabet gelar The Best Branch Manager dari 20 cabang di PT. MIF.

Dan saat ini, berkat kerja keras dan keuletannya, Yuli mengaku sudah mendapatkan kenyamanan dan penghasilan yang cukup memadai dengan bekerja di industri PBK. Singkat cerita, amanat untuk membuat konsep baru dalam mengangkat MGF, menjadi tantangan bagi Yuli dalam menunjukkan kinerjanya.

“Jika konsep kami ini berhasil, tentunya akan menjadi sebuah kebanggaan untuk saya dan teman-teman yang mendukung kejayaan MGF,” pungkask Yuli Handayani. ▲





*“Manfaatkan SRG
dan
Tingkatkan Kesejahteraan”*

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - BAPPEBTI
www.bappebti.go.id